

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini perkembangan perekonomian dunia sangat berkembang pesat. Menghadapi perkembangan bisnis dan ekonomi yang semakin kompetitif. Pada akhirnya membawa para pelaku bisnis dan ekonomi harus mampu mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis, baik itu dalam perusahaan dagang, manufaktur ataupun jasa. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki agar mampu bertahan hidup dan bersaing. Setiap perusahaan juga harus mengupayakan produktivitas karyawannya, efisiensi kerja, dan efektivitas operasional perusahaannya.

Good Corporate Governance merupakan salah satu kebutuhan sangat mendasar bagi setiap organisasi bisnis jika ingin menjadi perusahaan yang mampu bersaing di pasar global. Menurut **Basri Dan Burhan** dalam buku **Lanskap Ekonomi Indonesia (2009:233-234)** *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai atau keuntungan pemegang saham (*Shareholder*) dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Penerapan *Good Corporate Governance* ini harus dimulai. Pertama, dari membenahan struktur dan sistem pengelolaan melalui pemberdayaan

organ-organ perusahaan itu sendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direktur. Berikutnya adalah melalui upaya agar perusahaan bisa mengakomodasikan kepentingan-kepentingan *Stakeholder* yang terkait dengan perusahaan. Pengertian *Stakeholder* ini dapat dibagi dua, yaitu *Stakeholder* utama (*primary*) dan kedua (*secondary*). *Stakeholder* utama, yaitu para pemegang saham dan investor, karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok dan rekanan bisnis serta masyarakat setempat. *Stakeholder* kedua, yaitu pemerintah, masyarakat umum, lembaga-lembaga swadaya, media, akademisi, kelompok asosiasi bisnis, dan para pesaing.

Oleh sebab itu, masalah *Good Corporate Governance* sebetulnya bukan hanya masalah bagaimana meningkatkan laba perusahaan, meningkatkan nilai saham dibursa dan memberikan dividen yang sebesar-besarnya kepada *Shareholder*, melainkan bagaimana perusahaan tersebut mampu memberikan kontribusi positif dan membina hubungan baik dengan para *Stakeholder*¹

Konsep *Corporate Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna. *Good Corporate Governance* meskipun bukan merupakan suatu prinsip yang baru saja dikenal, tetapi pemahaman atas *Good Corporate Governance* masih banyak yang keliru. Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya *Corporate Governance*.

Setiap pedoman *Corporate Governance* tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada setiap organisasi atau Perusahaan, hal ini dimaksudkan karena kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda dan akan mengalami perkembangan

¹Basri Dan Burhan dalam buku Lanskap Ekonomi Indonesia (2009:233-234)

dari waktu ke waktu. Setiap perusahaan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan praktik-praktik *Corporate Governance* yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Akuntan memiliki peranan penting terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai Auditor Internal, Dimana organisasi profesi Audit Internal Indonesia terdiri atas *The Institute of Internal Audit (IIA)* – Indonesia Internal Audit *Chapter*; Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI) BUMN/BUMND; Yayasan Pendidikan Internal (YPIA); Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Audit (DS-QIA)* dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa fungsi Audit Internal (satuan pemeriksa *intern*) yang efektif, mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *Corporate Governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen. Audit Internal merupakan dukungan penting bagi Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan Manajemen Senior dalam membentuk fondasi bagi pengembangan *Corporate Governance*.²

Sejak akhir dekade '90-an fungsi dan peran Audit Internal telah memasuki orientasi baru dari peran tradisionalnya sebagai polisi atau pihak yang berkenan mencari kesalahan pihak lain dalam organisasi tanpa rekomendasi solusi, kearah fungsi dan peran yang baru sebagai mitra dan atau konsultan internal sehingga keberadaan Audit Internal diapresiasi secara positif sebagai *problem solver* dan *agent of change*.

Dimana fokus kerja Audit Internal telah bergeser dari fungsi mendeteksi pengendalian usaha menjadi pemberi solusi bagi penyempurnaan

²(Position Paper# 1/2003, 29 Juli 2003)

pengendalian usaha. Reformasi peran tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari manajemen dan *Stakeholder* untuk menciptakan *sound business practices* dan *Good Governance*. Disisi lainnya, Audit Internal harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan meningkatkan kualitas kerjanya sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, efisien dan efektif. Hal ini tentunya sangat didukung penerapan dari kode etik yang berlaku, prosedur pelaksanaan kegiatan audit, dan standar profesi Audit Internal yang berlaku.

Dilain pihak, perusahaan mengendalikan fungsi Audit Internal untuk membantu memastikan bahwa proses manajemen risiko, lingkup pengendalian, secara keseluruhan dan efektifitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan ekspektasi manajemen. Auditor Internal di masa lalu bertindak pasif dan hanya berorientasi pada Audit kepatuhan, maka tuntutan peran saat ini adalah sebagai *business partner* dan sebagai pemberi deteksi dini dalam mengidentifikasi risiko usaha serta berorientasi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Terlepas dari reputasinya yang sempat terpuruk oleh berbagai kasus kolapsnya beberapa perusahaan terkemuka seperti kasus ENRON atau WORLD.COM yang melibatkan peran Auditor, maka profesi Audit Internal semakin hari semakin dihargai di dalam organisasi.

Demikian halnya dengan Indonesia pernah yang mengalami keterpurukan ekonomi karena adanya penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kasus PT bank Global, Tbk, Kasus PT Great River Tbk, dan lain-lain. Demikian juga di Amerika skandal lain seperti kasus Enron, Adelphia, Merk, Lucent Technologies dan lain-lain. Skandal BLBI di

Indonesia dan mega skandal korporasi di Amerika Serikat juga sekaligus menunjukkan lemahnya *Good Corporate Governance* dan pengawasan terhadap perilaku para eksekutif puncak.³

Hal ini merupakan tantangan bagi Audit Internal untuk dapat memberikan sesuatu yang lebih berharga dan memiliki nilai tambah untuk *Auditee*. Ukuran keberhasilan Audit Internal bukanlah jumlah temuan melainkan bagaimana Audit Internal mampu memberikan saran dan rekomendasi yang efektif untuk membantu *Auditee* menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu seorang Audit Internal harus bertindak profesional dalam melakukan pekerjaannya tanpa dipengaruhi kepentingan (*interest*) pribadi.

“ Penilaian terhadap *control* dan *Governance Process* adalah salah satu aspek penting yang menjadi fokus dan tanggung jawab Audit Internal. Defenisi baru Audit Internal menyatakan bahwa dengan pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik akan lebih meningkatkan fungsi pengendalian yang pada akhirnya akan membantu manajemen menangani Risiko. Peran ini menjadi penting selaras dengan gencarnya kampanye pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia”⁴

Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki nilai *asset* yang demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan atau pendapatan negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk

³Dikutip dari buku Profesi Akuntan Publik di Indonesia, topik bahasan didalam Prinsip- prinsip umum *Good Corporate Governance*, halaman 17

⁴Amin.W.Tunggal 2012:6 Pedoman Pokok Audit Internal

praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global. Sebagai penopang ekonomi negara, diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance* bagi seluruh BUMN.

Penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah status kementerian BUMN telah tercantum di dalam misi BUMN yaitu melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan pada prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMN. Dan berdasarkan Surat Edaran Meneg BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara⁵, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER – 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara tertanggal 1 Agustus 2011⁶, *Good Corporate Governance* menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh BUMN. Pada pasal 2 disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten, dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya serta dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing-masing BUMN.

⁵Kep.Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002

⁶Salinan peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* pada BUMN

Dengan diwajibkannya pengimplementasian *Good Corporate Governance* pada Perusahaan BUMN, maka perusahaan-perusahaan tersebut dituntut pula untuk melakukan Audit Internal perusahaan karena Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif, serta penerapan Audit Internal telah diwajibkan pula berdasarkan Surat Edaran Bapepam No.SE-02/PM/2000 (bagi Perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Sehingga Audit Internal sudah seharusnya menjadi bagian dari struktur suatu Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Good Corporate Governance* dan Audit Internal di perusahaan-perusahaan memungkinkan praktik usaha yang transparan dan memiliki akuntabilitas. Penerapan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham serta *Stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya.

Namun kenyataannya, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* belum di implementasikan di semua badan usaha milik Negara (BUMN), khususnya bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi, dan telekomunikasi (PISET). Dari 25 BUMN bidang PISET, yang telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* baru 16 badan usaha. Skor yang diperoleh dari hasil rekomendasi menunjukkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN bersangkutan. Sebanyak 11 BUMN memperoleh skor di atas 70 yang menunjukkan BUMN itu telah dilengkapi dengan infrastruktur penerapan *Good Corporate Governance* dan

berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Beberapa BUMN dengan skor diatas 70 itu antara lain PT Semen Gresik, PT Semen Batu Raja, PT Aneka Tambang, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Timah, PT Krakatau Steel, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, PT.TELKOM Indonesia, PT LEN Industri. (**www.kompas.com , 8 Februari 2010**)

PT Perusahaan Telekomunikasi Bandung Indonesia, selanjutnya disingkat dengan PT.TELKOM yang memiliki skor diatas 70, menyatakan bahwa PT.TELKOM wajib mematuhi peraturan Bapepam-LK dan SEC. Selain itu, menerapkan dan berupaya menjunjung tinggi kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan berdasarkan international best practices serta pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan Indonesia (“*Good Corporate Governance*”) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* di Indonesia. Selama 2010, melalui sub-Direktorat Business Effectiveness PT.TELKOM telah melakukan desain ulang poses dalam rangka penyelarasan dengan perubahan bisnis perusahaan yang merupakan langkah implementasi kebijakan transformasi PT.TELKOM di bidang *Good Corporate Governance*.

Sebagai sebuah perusahaan publik, yang menyadari bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan lebih dari sekedar mematuhi peraturan, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan demi melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam rangka berupaya mempertahankan pertumbuhan usaha dalam industri komunikasi dan informasi yang sangat kompetitif.

Keberhasilan PT.TELKOM dalam implementasi *Good Corporate Governance* tercermin dalam berbagai penghargaan yang telah diterima oleh Perusahaan. Penghargaan tersebut antarlain adalah:

1. “*Most Trusted Companies based on Corporate Governance Perception Index Assessment*” dan “*Trusted Company based on Investor and Analyst’s Assessment Survey*” dari *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan majalah SWA (Desember 2009);
2. “*Best Good Corporate Governance–Non Financial Sector*” dari majalah *Business Review* dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) (Mei 2009)
3. Penghargaan yang diterima dari majalah *Finance As Audit Internal* pada Juli 2010, yaitu didalam kategori “*Best Managed Company*”, “*Best Corporate Governance*“, “*Best Investor Relation*”, “*Best Corporate Social Responsibility*”, dan “*Most Committee to a Strong Dividend Policy*”.
4. Penghargaan yang diterima dari ajang penghargaan *BUMN Award* dengan peringkat “*Best Corporate Governace* “ BUMN terbaik kedua”
5. Penghargaan yang diterima dari ajang penghargaan *Corporate Governance Award* dengan peringkat sebagai “*The Best Right of Shareholder*”.
6. Meraih *Best State Owned Enterprise* dalam *Good Corpoarte Governance 2011* dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) bekerjasama dengan Majalah *Business Review* (Desember 2011)

7. Meraih *Annual Best Financial Institutional Award 2011* dari *Alpha Southeast As Audit Internal* untuk kategori *Most Consistent Dividend Policy and Strongest Adherence to Corporate Governance*.(September 2011)

Dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengembangkan, menerapkan, serta meningkatkan struktur dan prosedur tata kelola guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* diterapkan di Perusahaan PT.TELKOM berkomitmen untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* secara konsisten agar senantiasa dapat memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan dan menjaga kepercayaan dari para pemegang saham dan masyarakat. Direksi telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 29 Tahun 2007 yang secara komprehensif mengatur dan memperbaiki pelaksanaan tata kelola Perusahaan.

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di PT.TELKOM merupakan bagian yang penting dari upaya Perusahaan untuk menjadikan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan terjamin kelangsungan bisnisnya, sesuai dengan visi PT.TELKOM, yaitu “menjadi perusahaan *Info Comm* terkemuka di kawasan regional.”

Tekad PT.TELKOM dalam menjalankan *Good Corporate Governance* tertuang dalam kerangka *Good Corporate Governance* TELKOM. PT.TELKOM sebagai perusahaan publik, menyadari bahwa para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang menuntut perusahaan agar menjalankan setiap transaksi (internal dan eksternal) sesuai dengan prosedur, kebijakan, hukum, dan *best practice* yang berlaku. (www.telkom.co.id)

Hal inilah yang dituntut dari PT.TELKOM oleh para investor, pemerintah dan regulator, pelaku bisnis dan komunitas keuangan. Dilakukan penelitian, untuk mengetahui fungsi profesi Audit Internal berpengaruh secara luas dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* pada banyak perusahaan, yang kini sudah menjadi tuntutan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir untuk mengikuti sidang sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dengan judul: **“Pengaruh Audit Internal terhadap Peningkatan *Good Corporate Governance*”**. (Studi kasus pada PT.Telekomunikasi Indonesia – Tbk - Jl Japati No. 1 Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Audit Internal pada PT.TELKOM sudah memadai?
2. Apakah *Good Corporate Governance* pada PT.TELKOM Indonesia sudah diterapkan dengan baik?
3. Apakah Audit Internal yang memadai dapat berpengaruh terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* pada PT.TELKOM Indonesia?
4. Seberapa besar pengaruh dan hubungan Audit Internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari, dan membandingkan teori dengan prakteknya dan melalui penyebaran data kuesioner mengenai pengaruh Audit Internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*, khususnya pada PT.TELKOM Indonesia Bandung. Selanjutnya data yang diperoleh diolah menggunakan metode statistik SPSS 16.0 untuk menganalisis pengaruh dan hubungan dari dua variabel, yang kemudian menganalisis tingkat signifikan tertentu, yang pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan dari penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Audit Internal di PT.TELKOM Indonesia telah memadai.
2. Untuk mengetahui bahwa *Good Corporate Governance* telah diterapkan di PT.TELKOM Indonesia.
3. Untuk mengetahui bahwa ada pengaruh Audit Internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* pada PT.TELKOM Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan Audit Internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governace*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi penulis kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* dan Fungsi Audit Internal di dalam perusahaan serta mengetahui lebih

dalam bagaimana pengaruh Audit Internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang tengah di hadapi perusahaan saat ini, sehubungan dengan topik yang diteliti. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat menjadi suatu bahan masukan, baik berupa saran atau koreksi, sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang perusahaan hadapi dan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran.

3. Bagi masyarakat dan dunia pendidikan

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama mengenai pengaruh Audit Internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.

1.5 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka dalam penelitian ini perlu diterapkannya batasan-batasan permasalahan berikut. Peneliti hanya meneliti pengaruh Audit Internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* perusahaan.